

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilu 1995 yang merupakan pesta demokrasi pertama di Indonesia, yang diikuti sebanyak 29 partai politik.¹ Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan yang sah. Pemilu menjamin berlangsungnya rotasi kekuasaan penyelenggara negara. Rotasi kekuasaan inilah yang merupakan hasil dari proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu merupakan ajang kontestasi politik lima tahunan yang memberikan ruang bagi keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan siapa pemimpinnya. Bagaimanapun pemimpin akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan publik dengan berdasarkan ketentuan hukum yang sah. Mereka adalah para penyelenggara negara, pengembal mandat rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat.

Salah satu pendapat Yusuf Qardhawi mengenai Islam dan Demokrasi dalam buku yang ditulisnya adalah substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai-nilai Islam. Hakikat demokrasi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan Islam, seperti dijelaskan Yusuf Qardhawi adalah: “bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim

¹ Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesi Cetakan I*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.1

² *Ibid.*, hlm.7

yang mereka benci. Mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila ia menyimpang, mereka tidak diboleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.”

Menurut Qardhawi, inilah demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi semacam ini memberikan beberapa bentuk dan cara praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, pemilihan umum dan referendum umum, mendukung pihak mayoritas, menerapkan sistem multipartai, memberikan hak kepada minoritas untuk berposisi, menjamin kebebasan pers dan kemandirian peradilan. Rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya dan mengoreksi perilakunya, mereka juga boleh menolak perintah penguasa yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Demokrasi semacam ini, menurut Yusuf Qardhawi, sejalan dengan Islam. Di dalam Islam, rakyat boleh menolak perintah imam yang menyuruh atau memaksa melakukan maksiat, dan rakyat berhak memecat atau menurunkan pemimpinnya bila menyimpang dan berlaku zalim, serta tidak pula menanggapi nasihat dan peringatannya.³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 46 dan 53 Tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena demokrasi

³ Ahmad Rey Fahriza, *Membedah Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Islam dan Demokrasi*, Universitas Indonesia, Depok, 2014, hal. 8

yang paling nyata di desa, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara). Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin desa. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan.⁴

Peran publik pemilih dan warga negara tidak bisa diabaikan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum adalah salah satu faktor untuk menilai sejauh mana kualitas pemilu itu diselenggarakan. Partisipasi tidak sekadar persoalan seberapa tinggi tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara, tetapi juga sejauh mana penggunaan hak pilih tersebut dilakukan atas kesadaran sebagai pemilih. Dalam pemilu di era Orde Baru, partisipasi pemilih relatif tinggi karena ada dimensi mobilisasi yang sudah dimainkan oleh rezim sepanjang tiga dekade lebih. Partisipasi pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak hanya bisa dilihat ketika masyarakat pemilih datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Tetapi lebih dari itu, keterlibatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilu seperti melaporkan adanya kecurangan pemilu, turut memantau proses rekapitulasi penghitungan suara, mendukung salah satu kandidat, melakukan survei tentang pemilu, juga merupakan bagian dari bentuk partisipasi masyarakat yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Salah satu hal yang selalu ditunggu dan dihitung selain hasil pemilu adalah angka partisipasi pemilih di dalam penyelenggaraan pemilu. Angka partisipasi

⁴ Rosnia Gosango, *Jurnal Politico*, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, Vol. 2, No 2, 2013, Halmahera Utara, 2013, hlm. 2.

pemilih, setidaknya akan menggambarkan sejauh mana partisipasi politik warga dalam kontestasi suatu pemilu. Jika ingin dilihat dari sisi lain, angka partisipasi pemilih ini juga akan menjelaskan kekuatan legitimasi dari orang yang terpilih melalui proses pemilu yang dilakukan. Karena pada hakikatnya, proses pemilu adalah bentuk penyerahan mandat dari pemilih kepada yang dipilih, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.⁵

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing - masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing - masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak - hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak - hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang”.⁶

Partisipasi politik amat penting dalam kontes dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab

⁵ Ramadhanil, Fadli dkk, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.1-2

⁶ Subekti, Tia, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, Malang, 2014, hlm.2

dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara umum. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta pengawasan penghitungan suara.⁷

Partai politik dalam pengertian modern merupakan fenomena baru dalam kehidupan bangsa Indonesia karena baru muncul pada era kolonial pada awal abad ke – 20. Organisasi partai tumbuh bersamaan dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan dan semangat pencarian identitas nasional oleh lapisan elite baru produk politik etis pemerintah kolonial Belanda pada 1901. Seperti diketahui, etische politiek membuka peluang kepada kaum terdidik bumiputera untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih luas daripada sekadar pendidikan dasar.⁸ Dalam pemilihan pemimpin ini serupa dengan hadis yang bersumber dari Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw. dalam kitab Sunan Abu Dawud. Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَجْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ

⁷ Nilam Suri, Puti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui Tahun 2015*. **JOM FISIP**, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, Pekanbaru, 2015, hlm.2

⁸ Haris, Syamsuddin, 2014. *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.20 - 21

ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمَرُوا أَحَدَهُمْ . قَالَ نَافِعٌ فُقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ
أَمِيرُنَا.⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahtin, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Hurairah berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Nafi' berkata, maka kami berkata kepada Abu Salamah kamu adalah pemimpin kami." (HR. Imam Abu Dawud).

Adapun bunyi hadis yang kedua yang diriwayatkan Ibn Umar r.a dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى الْوَجْهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " .¹⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: "Ketahuilah bahwa masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan diminta pertanggung jawaban tentang

⁹ Kitab Sunan Abu Dawud, Juz 8, hlm. 55, *Bab fil qoum yusafiruna yuammiru ahaduhum.*

¹⁰ الكتب « صحيح مسلم » كتاب الإمامة « باب فضيلة الإمام العادل و عقوبته »
...الجائر...

kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin yang mengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang budak adalah pemimpin yang mengurus harta majikannya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Ketahuilah, masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.” (HR. Imam Muslim).

Adapun bunyi hadis yang ketiga yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a dalam kitab Shahih Bukhari, Muslim sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي حَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِيَّيَّيْ أَحَافُ اللَّهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ.

Artinya : Abu hurairah r.a: berkata: bersabda nabi saw: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan allah, pada hati tiada naungan kecuali naungan allah : Imam (pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua

orang yang saling kasih sayang karena allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. (HR. Bukhari, Muslim).¹¹

Efektivitas kepemimpinan itu bukan ditentukan oleh seorang atau beberapa orang pemimpin saja, tetapi justru merupakan hasil bersama antara pemimpin dan orang – orang yang dipimpinya. Pemimpin tidak akan mampu berbuat banyak tanpa partisipasi bawahan, dan sebaliknya bawahan tidak akan efektif menjalankan tugas dan kewajibannya, tanpa pengendalian, pengarahan, dan kerja sama dengan pemimpin. Faktor partisipasi ini sangat menentukan dalam kepemimpinan, sehingga semakin aktif anggota kelompok organisasi dalam berpartisipasi, maka akan semakin dinamis kehidupan kelompok atau organisasi. Partisipasi dalam berpikir memecahkan masalah – masalah perlu digalakkan agar kepemimpinan dan inisiatif yang menjadikan kelompok organisasi menjadi dinamis, karena pemimpin merupakan tokoh sentral yang terbuka pada berbagai pembaharuan, inovasi, dan perubahan yang akan berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan organisasi.

Organisasi kepemimpinan efektif sangat dipengaruhi oleh kekuatan – kekuatan situasional baik internal maupun eksternal, yang terhimpun melalui efektivitas dan efisiensi. Adapun indikator kinerjanya

¹¹ “40 Hadis Tentang Pemimpin dan Penjelasannya,” Islam Is Logic, diakses pada 13 Februari, 2020. <https://islamlogic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjelasanya>.

menunjukkan : (1) produktivitas organisasi meningkat, (2) kepuasan kerja karyawan tinggi, dan (3) kontribusi nilai tambah (added value) bagi lingkungan berkembang.¹² Dalam berpartisipasi pemilihan pemimpin banyak yang melatar belakangi untuk berperan aktif dalam pemilihan seorang pemimpin yang mampu mengemban amanat yang telah di berikan masyarakat kepada pemimpin yang nantinya terpilih dikemudian hari, berbagai cara digunakan seorang calon pemimpin untuk merebut suara masyarakat agar mau memilihnya, berbagai upaya yang dilakukan seorang calon pemimpin yakni mengamppanyekan program-program yang nantinya dicanangkan oleh calon pemimpin tersebut di berbagai media cetak dan elektronik. Demikian juga berbagai problem yang muncul di tengah – tengah masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus saat ini membuat masyarakat bingung untuk memilih sosok seorang calon pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini menimbulkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang memberikan uang atau barang agar masyarakat mau memilih calon pemimpin tersebut, sehingga bilamana calon pemimpin yang baik dengan program – programnya kalah dengan yang mempunyai uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat.

Banyak sekali problem yang ditimbulkan oleh pemilihan pemimpin didesa tersebut yang kini ketika calon pemimpin tersebut memberikan uang atau barang yang tidak merata kepada warga Desa Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus sehingga para warga enggan untuk memberikan suaranya karena lebih baik kerja dibandingkan memberikan suara kepada calon pemimpin tersebut yang dinilai tidak memberikan uang atau barang, sehingga warga memilih untuk golput, untuk karena itu partisipasi masyarakat sangat penting dibutuhkan untuk menciptakan pemimpin yang bisa mengemban amanah masyarakat nantinya. Dari sinilah

¹² Soekarso, Iskandar Putong, *Kepemimpinan Kajian Teoritis dan Praktis*, 2015, hlm.10

kiranya mengapa penulis menganggap penelitian terhadap Urgensi Partisipasi dalam Pemilihan Pemimpin di Desa Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus ini sangat perlu untuk dilakukan. Setidaknya selain menambah wawasan berkaitan dengan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin tersebut juga mendokumentasikan dan merepresentasikan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Desa Pasuruhan Lor yang berkaitan dengan living sunnah.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah pokok masalah yang masih bersifat umum dan ditetapkan guna mempertajam penelitian serta ditentukan berdasar tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan,¹³ Berdasar pada pendapat Spradley sebagaimana dikutip oleh Sanapiah Faisal dalam Sugiyono yang mengemukakan adanya empat alternatif dalam menetapkan fokus,¹⁴ maka peneliti mengambil gabungan dari alternatif pertama dan keempat, yakni menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan (hasil *grand tour observation*) dan permasalahan tersebut terkait dengan teori - teori yang telah ada.

Sesuai dengan judul peneliti: "*Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pemimpin Di Desa Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus; Studi Living Sunnah*" maka peneliti hanya akan terfokus pada sejarah yang melatarbelakangi munculnya urgensi tersebut dan partisipasi masyarakat dalam perspektif sunnah di Desa Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus.

Maka dengan ini peneliti menegaskan bahwa hasil penelitian ini nantinya untuk mengetahui urgensi partisipasi dan perspektif sunnah tentang memilih pemimpin. Selain itu, guna mengetahui latar belakang masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus. Adapun alasan mengapa peneliti menggunakan metode

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 287-288.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 290.

penelitian *living sunnah* atau penelitian lapangan, karena ingin melihat implementasi sunnah tentang Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Memilih Pemimpin di Desa Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.¹⁵ Berdasarkan *level of explanation* suatu gejala, umumnya terdapat tiga bentuk rumusan masalah, yakni deskriptif, komparatif, dan asosiatif serta tambahan pengembangan satu lagi yaitu komparatif – asosiatif.¹⁶ Adapun penelitian ini berangkat dari rumusan masalah yang bersifat diskriptif dari tiap - tiap domain dan dilanjutkan dengan rumusan masalah komparatif guna mendapatkan hasil akhir penelitian. Berikut rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti :

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik dua pertanyaan pokok, yaitu :

1. Bagaimana memilih pemimpin dalam Perspektif Sunnah di Desa Pasuruhan Lor?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Pasuruhan Lor dalam memilih pemimpin?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat bertujuan :

1. Mengetahui seberapa penting pandangan sunnah memilih pemimpin dalam partisipasi di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
2. Mengurai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi memilih pemimpin di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 286.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 290.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam bidang studi Sunnah, hasil penelitian bisa menjadi salah satu sumbangsih referensi dalam kajian lapangan (*living sunnah*) yang peminatnya masih sangat minim.
 - b. Bagi Prodi Ilmu Hadis (IH), penelitian lapangan kajian Sunnah berbasis ilmu - ilmu sosial ini bisa menjadi *pioneer* sehingga kelak akan semakin banyak penelitian serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi *insider* (Masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus), hasil penelitian ini bisa menjadi bahan telaah demi memperdalam pemahaman tentang meningkatkan partisipasi di desa tersebut.
 - b. Bagi *outsider* (Luar wilayah Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus), hasil penelitian ini bisa menjadi pembuka mata wacana sehingga penilaian yang se-obyektif mungkin bisa teridentifikasi.
 - c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini bisa membantu penentuan sikap atau kebijakan publik yang diambil guna kemaslahatan hidup orang banyak.
 - d. Bagi peneliti pribadi, hasil penelitian ini bisa meningkatkan kompetensi personal dan pengalaman utamanya dalam penelitian sunnah di lapangan dengan berperspektif ilmu - ilmu sosial.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk mempermudah dalam mempelajari proposal ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan skripsi ini sebagaimana berikut :

Judul dari penelitian skripsi ini berada pada halaman judul yang bersambung dengan halaman persetujuan serta pengesahan skripsi. Selanjutnya, dalam halaman motto Peneliti menuliskan motto

yang sangat memberi suntikan motivasi selama penelitian. Adapun dalam halaman persembahan dan kata pengantar memuat ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak - pihak yang membantu selama penelitian. Lalu, sebagai bentuk tanggung jawab kejujuran atas hasil penelitian, halaman pernyataan keaslian karya tulis bersambung dengan abstraksi. Kemudian guna membantu pemahaman pembaca, disertakan pula halaman pedoman transliterasi, pedoman kata baku serta daftar isi.

Isi dari laporan penelitian skripsi ini berawal dari bab I yang berisi Pendahuluan, Peneliti mengemukakan latar belakang masalah guna menjelaskan gambaran umum tentang sunnah sebagai sumber hukum yang ke dua setelah Al-Qur'an, pengaplikasian sunnah di masyarakat sampai pada penafsiran Hadis Shahih Muslim tentang urgensi partisipasi. Selanjutnya, dipilih fokus penelitian berupa sejarah terbentuknya dan perspektif sunnah dalam pemilihan pemimpin. Fokus tersebut menginspirasi dua buah rumusan masalah yang diformulasikan sebagai tujuan penelitian. Lalu dipaparkan pula manfaat penelitian ini serta sistematika penyusunan skripsi guna memudahkan pemahaman para pembaca.

Belanjut ke Bab II tentang urgensi partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin, Peneliti mendeskripsikan beberapa hasil kajian pustaka terkait urgensi, partisipasi, pemilihan pemimpin, Peneliti mencantumkan pula hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan topik kajian penelitian ini. Terakhir, kerangka berpikir memuat beberapa teori yang diintegrasikan oleh Peneliti secara sistematis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Menginjak Bab III, Peneliti menjelaskan secara runtut tentang metode penelitian yang terdiri dari sifat dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, setting penelitian, teknik

pengumpulan data, uji keabsahan data serta teknik analisis data.

Hasil penelitian dipaparkan oleh Peneliti di Bab IV dalam judul Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pemimpin Desa Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus Studi Living Sunnah yang dibagi dalam dua item sub-bab. Pertama, Peneliti menjelaskan tentang urgensi partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin. Setelah itu, dalam sub bab kedua, peneliti mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin dalam perspektif sunnah.

Sebagai penutup dari laporan penelitian ini, di Bab V menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran yang semoga berguna bagi pembaca dan para akademisi pada umumnya dan dirangkai dengan kata penutup.

Di bagian paling belakang, ada daftar pustaka yang memuat referensi literatur maupun hasil wawancara lapangan yang terkait dengan penelitian ini. Tak lupa Peneliti menyertakan lampiran yang memuat berkas penting yang berkaitan dengan penelitian, foto kegiatan pengumpulan data, dan pedoman wawancara dengan narasumber. Terakhir, pembaca bisa menelaah profil Peneliti dalam halaman daftar riwayat hidup.